

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Rembran Fanrejin (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai), 2022
“Efektivitas Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Politik di Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan Pendidikan politik di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum efektif, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama sosialisasi program meliputi kemampuan SDM/non SDM yang mana sarana dan prasarana masih belum lengkap serta anggaran yang terbatas, serta dalam media sosialisasi masih belum efektif untuk menjangkau Masyarakat secara menyeluruh. Tujuan program ini cukup efektif yaitu memberi pemahaman kepada Masyarakat betapa pentingnya partisipasi politik itu dan dilakukan secara kesinambungan. Adapun faktor-faktor yang menghambat Adalah faktor penghambat pertama, terbatasnya anggaran yang diberikan serta sarana prasarana yang tidak lengkap. Kedua, kurangnya inovasi dan promosi sehingga tidak menjangkau Masyarakat secara menyeluruh. Upaya yang dilakukan dengan menambah sarana prasarana juga melakukan promosi. Disarankan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara agar memberikan pengawasan serta motivasi dan semangat kepada para pegawai agar pegawai bekerja dengan maksimal. Kepala kantor harap

dapat melengkapi fasilitas sarana dan prasarana agar program dapat berjalan dengan maksimal.

2. Ikhsan Yuditra Usman (Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang), 2024 **“Efektivitas Program Bantuan Keuangan Partai Politik Terhadap Pendidikan Politik Bagi Kader Parpol Di Provinsi Kepulauan Riau”**. Fenomena penelitian ini adalah untuk melihat bantuan keuangan yang disalurkan kepada partai politik, terkhusus di Provinsi Kepulauan Riau terhadap pelaksanaan Pendidikan Politik untuk Kader Partai Politik masing-masing. Menurut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menyebutkan, pada Tahun 2022-2023 Provinsi Kepulauan Riau pada indikator ke 22 yakni “Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik” mengalami penurunan. Sehingga, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efektivitas bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik berdampak signifikan atau tidak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Richard M. Steers (1977), yang memiliki 3 indikator dalam efektivitas program, yakni Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan Pencapaian Tujuan, bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada partai politik akan di danai setelah BPK RI menyetujui pendanaan yang diberikan. Integrasi, Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau selaku jalur dalam penerimaan proposal dan laporan

pertanggungjawaban partai politik, sudah melakukan sosialisasi terkait contoh dan penggunaan bantuan keuangan yang diterima partai politik. Dan, Adaptasi, Kesbangpol sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam memverifikasi menilai hasil laporan pertanggungjawaban yang diberikan partai politik. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik yakni PDI Perjuangan, PKS, Demokrat, Golkar, dan PPP menyatakan sudah melaksanakannya dengan baik dan telah dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban ke Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan dua penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa efektivitas program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), baik dalam bidang pendidikan politik maupun dukungan terhadap pendidikan politik partai politik, masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Penelitian Rembran Fanrejini (2022) menunjukkan bahwa efektivitas kerja Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penyelenggaraan pendidikan politik belum berjalan optimal, terutama disebabkan oleh keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta minimnya inovasi dan media sosialisasi yang efektif. Meskipun tujuan program dinilai cukup tercapai dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik, pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan dari sisi dukungan sumber daya dan manajemen program.

Sementara itu, penelitian Ikhsan Yuditra Usman (2024) menegaskan bahwa efektivitas program bantuan keuangan partai politik

terhadap pendidikan politik kader di Provinsi Kepulauan Riau dinilai efektif jika ditinjau dari indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Kesbangpol berperan aktif dalam proses sosialisasi, verifikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak. Namun demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek administrasi dan tata kelola bantuan keuangan partai politik, serta belum secara spesifik mengkaji dampak program terhadap perubahan sikap dan perilaku politik generasi muda di lingkungan pendidikan formal.

Kebaruan (*novelty*) dalam skripsi ini terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan pendekatan efektivitas program yang digunakan. Pertama, penelitian ini secara spesifik mengkaji Efektivitas Program Pembinaan Ideologi Pancasila yang menysasar pelajar SMK/SMA, sementara penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pendidikan politik masyarakat umum dan kader partai politik. Kedua, penelitian ini mengungkap faktor pendukung dan penghambat efektivitas program pembinaan ideologi Pancasila secara lebih mendalam, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kolaborasi dengan pihak sekolah, serta metode pembinaan yang belum variatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai tingkat efektivitas program, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis bagi Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program pembinaan ideologi Pancasila di masa mendatang.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berjalan dengan baik. Efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata efektif yang diartikan dengan ada efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil (KBBI 2005). Efektivitas merupakan unsur pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi atau program yang akan dijalankan. Berarti juga dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai. Dimana apabila semakin besar persentase target yang dapat dicapai, maka akan semakin tinggi pula keefektifitasnya, dikatakan efektif apabila tercapainya tujuan ataupun sasaran –sasaran seperti yang telah ditentukan. (Rahmadi, 2022:16).

Efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran yang dapat menggambarkan sejauh mana target dapat tercapai. Keefektifan suatu program dapat diamati dari indikator-indikator berupa ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran. (Zakiyah et al., 2020).

b. Ukuran Efektivitas

Menurut Rossi, Lipsey, & Henry (2019: 25–30), dalam bukunya *Evaluation: A Systematic Approach* menjelaskan bahwa efektivitas program merupakan ukuran sejauh mana suatu program mampu mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Efektivitas program mencerminkan keberhasilan program dalam menghasilkan dampak yang diinginkan pada kelompok sasaran di bawah kondisi pelaksanaan yang sebenarnya. Efektivitas program dapat dianalisis melalui lima komponen utama yang saling berhubungan, yaitu *input*, proses, *output*, *outcome*, dan evaluasi berkelanjutan.

1) *Input* Program

Input merupakan segala sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program. *Input* dapat berupa anggaran, tenaga pelaksana, sarana prasarana, materi, maupun dukungan kebijakan. Dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila di Hulu Sungai Utara, *input* mencakup alokasi dana dari pemerintah daerah, keterlibatan pegawai Kesbangpol sebagai fasilitator, ketersediaan media sosialisasi seperti modul, *leaflet*, atau *audiovisual*, serta dukungan regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah. *Input* yang terbatas, misalnya dana yang minim atau kurangnya fasilitator yang kompeten, akan sangat memengaruhi kualitas pelaksanaan program. Dengan kata lain, keberhasilan tahap berikutnya sangat ditentukan oleh sejauh mana *input* yang tersedia relevan dan memadai.

2) Proses Pelaksanaan Program

Proses pelaksanaan adalah bagaimana program dirancang dan dijalankan sesuai rencana. Komponen ini menilai mekanisme kerja, metode, strategi, serta pola interaksi antara pelaksana dan peserta. Dalam kegiatan pembinaan ideologi Pancasila, proses pelaksanaan biasanya berbentuk sosialisasi, ceramah, seminar, atau diskusi kelompok. Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa metode yang digunakan sering dianggap monoton dan kurang menarik, sehingga pelajar menjadi kurang antusias. Jika proses pembinaan hanya berfokus pada ceramah satu arah tanpa inovasi, maka efektivitas program menjadi rendah. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara untuk menyesuaikan metode dengan kebutuhan generasi muda, misalnya menggunakan media digital, simulasi, atau kegiatan

kreatif berbasis praktik agar lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari pelajar.

3) *Output* Program (Hasil Langsung)

Output adalah hasil yang tampak segera setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Indikator *output* dapat berupa jumlah peserta yang hadir, tingkat ketercapaian target sosialisasi, atau peningkatan pengetahuan awal tentang ideologi Pancasila. Dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila di Hulu Sungai Utara, *output* bisa diukur dari jumlah pelajar yang mengikuti kegiatan tiap tahun, jumlah materi yang berhasil disampaikan, atau laporan kehadiran peserta. Meskipun *output* ini penting, hasil langsung seringkali tidak menunjukkan perubahan substantif. Sebagai contoh, pelajar mungkin hadir dalam kegiatan, tetapi belum tentu memahami secara mendalam makna dan fungsi Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa *output* hanya bersifat kuantitatif dan belum bisa menjadi ukuran utama efektivitas.

4) *Outcome* Program (dampak jangka menengah/panjang)

Outcome merupakan dampak yang lebih mendalam dan bersifat jangka menengah hingga panjang. *Outcome* biasanya berupa perubahan pengetahuan, sikap, nilai, maupun perilaku peserta setelah mengikuti program. Dalam kasus pembinaan ideologi Pancasila, *outcome* yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman pelajar tentang Pancasila, tumbuhnya rasa nasionalisme, terbentuknya sikap toleransi, serta pengamalan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, fenomena menunjukkan bahwa *outcome* program ini masih belum optimal. Banyak pelajar yang belum memahami makna dan fungsi Pancasila secara menyeluruh, bahkan masih menganggap kegiatan sosialisasi tidak relevan. Ini menandakan bahwa ada kesenjangan antara *output* (kehadiran peserta) dengan *outcome* (perubahan sikap dan pemahaman).

5) Evaluasi berkelanjutan

Evaluasi berkelanjutan merupakan komponen yang sangat penting dalam menjaga efektivitas program. Evaluasi ini meliputi pemantauan, pengukuran capaian, serta tindak lanjut perbaikan secara berkesinambungan. Dalam program pembinaan ideologi Pancasila, evaluasi seharusnya dilakukan secara rutin, baik dengan mengukur pemahaman pelajar melalui instrumen tes, survei sikap, maupun wawancara mendalam. Namun kenyataannya, evaluasi di Hulu Sungai Utara masih sangat terbatas, sehingga sulit mengetahui sejauh mana program benar-benar berhasil. Tanpa evaluasi yang berkesinambungan, program cenderung berjalan secara administratif dan rutinitas, bukan berbasis pada perbaikan yang berkelanjutan. Padahal, evaluasi sangat penting agar metode, materi, maupun strategi pembinaan bisa disesuaikan dengan dinamika kebutuhan pelajar dari tahun ke tahun.

c. Teori Efektivitas

Pengertian efektifitas menurut Abdurahmat (2003:92) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas Sondang P.Siagian (2001:4) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektifitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. (Luthfi, 2019).

Kemudian Efektivitas menurut Bedjo Siswanto (1990:62) berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Menurut Sutarto (1978:95) Efektivitas kerja adalah suatu keadaan dimana aktifitas jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia dapat mencapai hasil akibat sesuai yang dikehendaki. Efektivitas kerja merupakan suatu ukuran tentang pencapaian suatu tugas atau tujuan (Schermerhorn, 1998:5). Menurut Handoko (1997:7) Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau

peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Menurut Siagian (1986:152) efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. (Kemuja et al., 2022).

Di samping itu Menurut Richard M Steers dalam (Saputro, 2020) efektivitas digolongkan dalam 3 (tiga) model, yaitu:

- 1) Model optimasi tujuan, penggunaan model optimasi bertujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakuinya bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula. Dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil dengan tujuan organisasi.
- 2) Prespektif sistem, memusatkan perhatiannya pada hubungan antara komponen-komponen baik yang berbeda didalam maupun yang berada diluar organisasi. Sementara komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau keberhasilan organisasi. Jadi model ini memusatkan perhatiannya pada hubungan sosial organisasi lingkungan.
- 3) Tekanan pada perilaku, dalam model ini, efektivitas organisasi dilihat dari hubungan antara apa yang diinginkan organisasi. Jika keduanya relatif homogen, kemungkinan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar.

d. Faktor yang mempengaruhi efektivitas

Empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang dikemukakan oleh Richard M Steers dalam (Engka & Natsir, 2024) :

1) Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi)

Penekanan ciri organisasi oleh Steers adalah terhadap struktur dan teknologi karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi efektivitas organisasi. Perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar anggota-anggota organisasi atau penyusunan hubungan SDM akan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan tercapainya berbagai kemajuan di dalam struktur organisasi, misalnya dengan meningkatkanspesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi akan meningkatkan produktivitas organisasi. Tercapainya kemajuan di dalam teknologi dapat memperkenalkan cara-cara yang lebih produktif dengan menggunakan sarana-sarana baru akan mempengaruhi

efektivitas organisasi. Pemanfaatan kedua hal tersebut secara baik, yakni struktur dan teknologi akan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuannya.

2) Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan)

Karakteristik lingkungan ini mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan organisasi. Lingkungan intern pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.

3) Karakteristik Pekerjaan (perbedaan sifat pekerja)

Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja. Tanpa rasa keterkaitan dan prestasi, efektivitas mustahil akan tercapai.

4) Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen

Faktor ini merupakan mekanisme yang meliputi penentuan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi. Dalam hal ini, manajer sangat penting untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan secara profesional untuk mencapai tujuan.

2. Program

a. Pengertian Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Didalam program dibuat beberapa aspek yaitu mengenai tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, perkiraan anggaran yang dibutuhkan serta diperlukannya strategi pelaksanaan.

Program adalah unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Didalam program di buat beberapa aspek, disebutkan bahwa dalam setiap program dijelaskan mengenai

- 1) Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
- 2) Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- 3) Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui
- 4) Perkiraan anggaran yang dibutuhkan
- 5) Strategi pelaksanaan.

Berdasarkan Amalia F. pada skripsinya pada tahun 2020 Program merupakan serangkaian kegiatan yang telah direncanakan sebelum terlaksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan. Menurut Saifudin Anshari, program merupakan daftar terinci mengenai acara dan usaha yang akan dilaksanakan. Wholey, et.al (1994: 41) menyatakan bahwa program dapat didefinisikan sebagai seperangkat sumber daya dan kegiatan yang diarahkan pada satu atau lebih tujuan bersama. Menurut Suharsimi Arikunto (2012:291) mendefinisikan program sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Sedangkan Farida Yusuf Tayibnapi (2013: 9) mengartikan program sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan program merupakan rangkaian kegiatan yang memerlukan perencanaan. Dalam melaksanakan sebuah program perlu adanya sasaran, manfaat dan tujuan tertentu untuk dapat dikatakan program tersebut berhasil.

Biasanya dalam melaksanakan terdapat pengelolaan program berupa perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program.

1) Perencanaan Program

Perencanaan program dapat diartikan dengan mempersiapkan program secara matang. Proses perencanaan yaitu menentukan tujuan, strategi dan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program. Perencanaan program dapat dikatakan sebagai strategi pelaksanaan sebuah program untuk mencapai tujuan program tersebut. Menurut Nawawi, H (2003:29-30) perencanaan merupakan proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan. Perencanaan yaitu proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang (Djudju Sudjana, 2000: 61).

2) Pelaksanaan Program

Pelaksanaan merupakan kelanjutan dari perencanaan program. Setelah perencanaan program telah ditetapkan, selanjutnya program dilaksanakan dengan acuan dari perencanaan tersebut. Menurut Abdul Rohman Nurfaal dalam skripsinya (2014: 37) menyebutkan pelaksanaan merupakan tahapan lanjutan dari tahapan perencanaan, pelaksanaan merupakan upaya untuk mewujudkan perencanaan dalam wujud kegiatan. Dalam teori fungsi manajemen menurut GR Terry,

pelaksanaan dapat diartikan sebagai penggerakkan, senada dengan itu Didin Kurniadin (2012: 287) mendefinisikan pergerakan (actuating) sebagai “tindakan untuk memulai, memprakarsai, memotivasi dan mengarahkan, serta mempengaruhi para pekerja mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi” dalam Ribka Ambarwati (2017: 18).

3) Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan proses menganalisis program dengan membandingkan hasil program dan tujuan program semula, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Djudju Sudjana (2006:21) mengemukakan bahwa evaluasi program adalah kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berhasil dan dampak yang dihasilkan dari program tersebut. Menurut Djudju Sudjana (2006:36) tujuan evaluasi yaitu untuk: 1) memberikan masukan bagi perencanaan program, 2) menyajikan masukan bagi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan, atau penghentian program, 3) memberi masukan bagi pengambilan keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program, 4) memberi masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program, 5) memberi

masukannya untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervise, dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program, dan 6) menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan luar sekolah.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa evaluasi program merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai suatu program yang digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun membuat program selanjutnya.

3. Efektivitas Program

a. Pengertian Efektivitas program

Efektivitas program merujuk pada sejauh mana suatu program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, efektivitas program diukur bukan hanya oleh pencapaian tujuan akhir, tetapi juga oleh cara program dijalankan, penggunaan sumber daya, dan dampak pada penerima manfaat.

Efektivitas program adalah ukuran Keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan disebut efektivitas program. Program efektif jika mampu memberikan hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Efektivitas juga mencakup kemampuan program untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan penerima manfaat.

Efektivitas program mengacu pada sejauh mana suatu program mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang optimal. Ini menunjukkan seberapa baik program tersebut mampu memberikan hasil yang diharapkan atau mengatasi masalah yang menjadi alasan program tersebut dibentuk. Efektivitas program diukur dari kemampuan program untuk menghasilkan dampak positif sesuai dengan indikator yang telah dirancang sebelumnya (Sary, 2024).

b. Teori Efektivitas Program

Teori efektivitas program mengacu pada berbagai pendekatan dan model yang digunakan untuk memahami bagaimana sebuah program dapat dinilai efektif atau tidak. Teori ini menggabungkan konsep-konsep dari manajemen, kebijakan publik, serta evaluasi program. Beberapa teori dan model yang sering digunakan dalam mengevaluasi efektivitas program meliputi (Advebty, 2023):

1) Teori Logika Program (*Program Logic Model*)

Teori logika program menyatakan bahwa efektivitas program bergantung pada hubungan yang jelas antara sumber daya yang digunakan (*input*), kegiatan yang dilakukan (*proses*), hasil yang diharapkan (*output*), dan dampak yang dihasilkan (*outcome*). Dalam teori ini, efektivitas diukur berdasarkan apakah input dan proses program menghasilkan output dan outcome yang diharapkan.

- a) *Input*: Sumber daya yang digunakan dalam program (misalnya dana, tenaga kerja).
- b) *Proses*: Aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan program.
- c) *Output*: Hasil langsung dari aktivitas tersebut (misalnya jumlah orang yang terlibat, produk yang dihasilkan).
- d) *Outcome*: Dampak jangka pendek dan jangka panjang dari output program.

2) Teori Sistem (*Systems Theory*)

Teori sistem memandang efektivitas program sebagai hasil interaksi yang harmonis antara berbagai elemen program. Program dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait (input, proses, output, dan lingkungan eksternal). Efektivitas program dipengaruhi oleh sejauh mana semua komponen ini berfungsi secara sinergis. Teori ini juga menekankan pentingnya umpan balik (feedback) dalam meningkatkan efektivitas. Melalui evaluasi dan umpan balik, program dapat terus diperbaiki agar lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

3) Teori Kontingensi (*Contingency Theory*)

Teori kontingensi menyatakan bahwa tidak ada satu pendekatan atau metode yang dapat diterapkan secara universal untuk mencapai efektivitas program. Sebaliknya, efektivitas program bergantung pada faktor-faktor kontekstual seperti

lingkungan, sumber daya yang tersedia, dan karakteristik organisasi atau kelompok sasaran. Menurut teori ini, program harus disesuaikan dengan kondisi spesifik agar bisa efektif.

4) Teori Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation Theory*)

Teori ini mengkaji efektivitas program dari sudut pandang implementasi kebijakan. Efektivitas tergantung pada sejauh mana kebijakan yang dirumuskan diterapkan dengan benar dan sesuai dengan rancangan awal. Hal ini meliputi komitmen dan kapasitas organisasi yang melaksanakan program, serta penerimaan dari kelompok sasaran. Faktor-faktor seperti koordinasi antar lembaga, kesesuaian regulasi, serta kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi efektivitas implementasi program.

5) Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*)

Model CIPP digunakan dalam evaluasi program untuk menilai efektivitasnya melalui empat komponen utama:

- a) *Context*: Menilai relevansi program berdasarkan analisis situasi dan masalah yang ingin diselesaikan.
- b) *Input*: Mengevaluasi sumber daya, strategi, dan rencana yang digunakan untuk mendukung program.
- c) *Process*: Menganalisis pelaksanaan program, termasuk hambatan dan kesesuaian dengan rencana.
- d) *Product*: Menilai hasil akhir program, baik dalam hal output maupun outcome. Model CIPP menekankan pentingnya

evaluasi berkelanjutan pada setiap tahap program untuk meningkatkan efektivitas secara keseluruhan.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program

Menurut (Weiss,C.H.(1998) *Evaluation:Methods for Studying Programs and Policies. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall., n.d.*), beberapa faktor yang mempengaruhi Efektivitas program, antara lain:

- 1) Desain Program, Desain program yang baik, dengan tujuan yang jelas dan strategi yang tepat, merupakan kunci utama efektivitas. Program yang dirancang dengan baik memiliki peluang lebih besar untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 2) Pelaksanaan Program, Kualitas pelaksanaan program, termasuk manajemen, koordinasi, dan pengawasan, sangat menentukan efektivitas. Program yang diimplementasikan dengan baik cenderung lebih efektif.
- 3) Keterlibatan Stakeholder, Partisipasi aktif dari stakeholder, termasuk penerima manfaat, sangat penting dalam meningkatkan efektivitas program. Keterlibatan mereka memastikan bahwa program benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan mereka.
- 4) Evaluasi dan Monitoring, Evaluasi yang rutin dan sistematis memungkinkan program untuk diukur efektivitasnya dan diidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Monitoring berkelanjutan juga membantu dalam menjaga kualitas pelaksanaan program. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antararencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektifitas program.

Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program. Sementara itu pendapat pelanggan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerkpatrick bahwa evaluasi terhadap efektivitas program dapat dilakukan, diantaranya

melalui reaksi pelanggan terhadap program yang diikuti. Bermanfaatkah dan puaskah pelanggan terhadap program merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur reaksi pelanggan terhadap program. (Ii, n.d.) Maka dari itu, Suatu program yang dijalankan dapat dikatakan efektif apabila mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk menilai efektivitas suatu program perlu dilakukan agar dapat mengetahui sejauhmana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. karena efektifnya suatu program merupakan gambaran keberhasilan organisasi dalam tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. (Anis et al., 2021 dalam Hastuti 2025) .

4. Program Pembinaan Ideologi Pancasila

a. Pengertian Program Pembinaan Ideologi Pancasila

Pembinaan ideologi Pancasila merupakan suatu usaha terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk menanamkan, menginternalisasikan, serta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh warga negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa memiliki kedudukan fundamental dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan identitas bangsa. Oleh karena itu, pembinaan ideologi menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan bangsa di tengah arus globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi. Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan juga sebagai *way of life* yang

mengarahkan perilaku warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Kaelan (2017), dalam bukunya Pendidikan Pancasila, Pancasila adalah filsafat hidup bangsa yang harus dibina agar tetap menjadi pedoman dalam perilaku warga negara. Tanpa adanya pembinaan, Pancasila berpotensi hanya menjadi simbol formal tanpa dimaknai secara mendalam oleh masyarakat, khususnya generasi muda.

Pembinaan ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Lembaga pemerintah seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta Kesbangpol di tingkat daerah memiliki mandat untuk merancang dan melaksanakan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, pembinaan ideologi Pancasila dilakukan melalui berbagai jalur:

- 1) Pendidikan Formal → melalui kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, seperti mata pelajaran PPKn dan mata kuliah Pancasila.
- 2) Pendidikan Nonformal → melalui kegiatan sosialisasi, seminar, workshop, pelatihan bela negara, kemah kebangsaan, dan diskusi kebangsaan.
- 3) Pendidikan Informal → melalui keluarga, masyarakat, organisasi kepemudaan, media massa, dan media sosial.

Pembinaan ini dapat dilakukan oleh berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat (BPIP), pemerintah daerah (Kesbangpol), sekolah, organisasi masyarakat, hingga keluarga.

b. Tujuan Program Pembinaan Ideologi Pancasila

Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila, tujuan utama program ini adalah untuk membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, materi dasar Pancasila digunakan untuk:

- 1) Mengaktualisasikan Pancasila dalam penyelenggaraan negara;
- 2) Menjamin peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, serta asas Bhinneka Tunggal Ika;
- 3) Mewujudkan tata ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
- 4) Meningkatkan budaya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila;
- 5) Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial melalui demokrasi politik dan ekonomi berlandaskan Pancasila

5. Peran Kesbangpol dalam Pembinaan Ideologi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta stabilitas politik dan keamanan di daerah. Salah satu tugas pentingnya adalah melaksanakan program pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat, termasuk kalangan pelajar

SMA/SMK. Sebagai representasi pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, Kesbangpol bertugas menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program-program lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda.

Peran Strategis Kesbangpol dalam Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu :

a. Sebagai Pelaksana Kebijakan Ideologi di Daerah

Kesbangpol bertugas menyinergikan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dari pemerintah pusat dengan pelaksanaannya di daerah. Hal ini dilakukan melalui program sosialisasi, pendidikan kebangsaan, serta kegiatan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, terutama generasi muda.

b. Sebagai Fasilitator Kegiatan Pembinaan Ideologi

Kesbangpol berperan menyediakan fasilitas, narasumber, serta materi pembinaan ideologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program biasanya berupa seminar, workshop, pelatihan, diskusi kebangsaan, kemah bela negara, hingga kegiatan keorganisasian di kalangan pemuda.

c. Sebagai Mediator antara Pemerintah dan Masyarakat

Dalam menjaga stabilitas politik dan ideologi, Kesbangpol menjadi penghubung antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan, sekolah, lembaga keagamaan, dan komunitas masyarakat. Melalui komunikasi dua arah ini, Kesbangpol dapat menyampaikan kebijakan pemerintah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

d. Sebagai Pengawas dan Evaluator Ideologi di Daerah

Kesbangpol juga memiliki fungsi memantau kondisi ideologi masyarakat, termasuk potensi ancaman seperti penyebaran paham radikalisme, intoleransi, maupun ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila. Hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi kepala daerah.

e. Sebagai Agen Penguatan Ketahanan Nasional

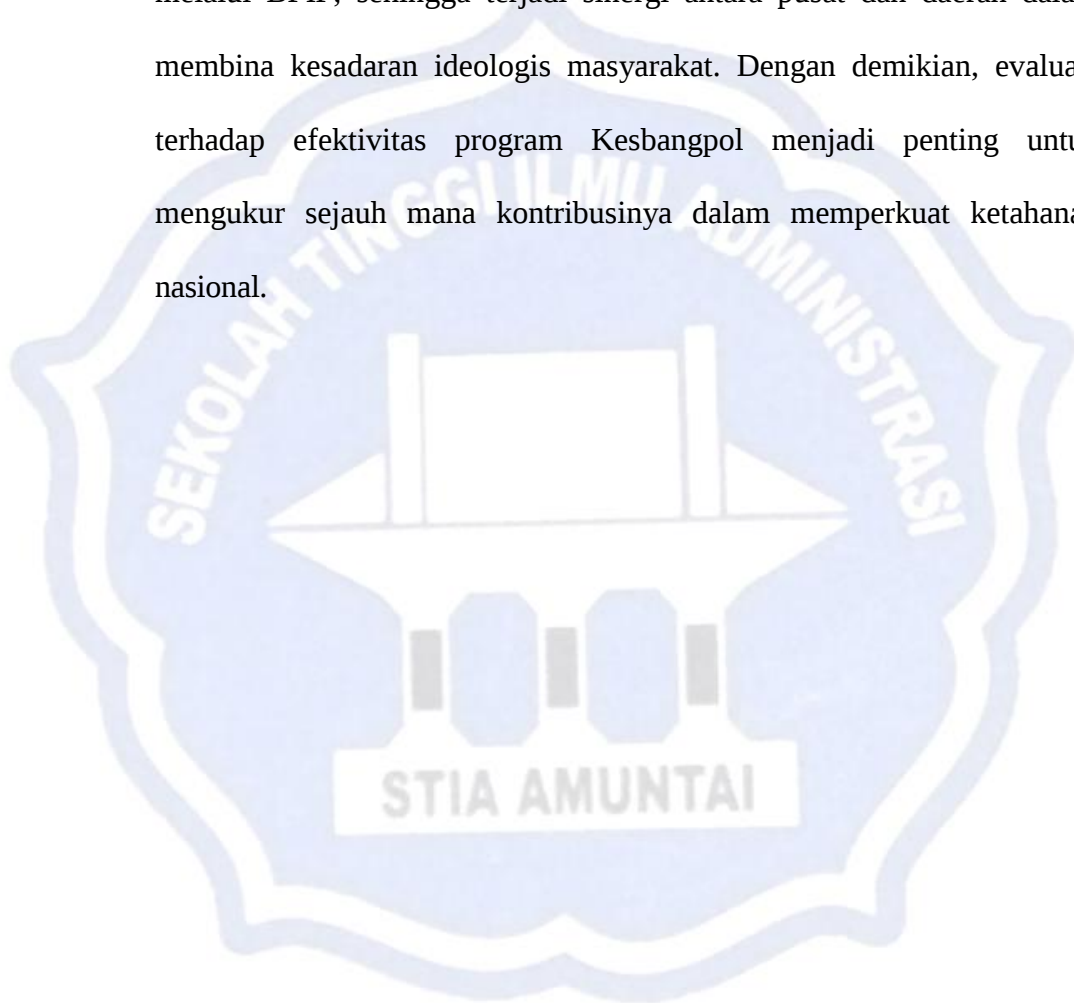
Dengan membina kesadaran ideologis masyarakat, Kesbangpol turut memperkuat ketahanan nasional di bidang ideologi. Generasi muda yang memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila akan menjadi benteng utama bangsa dalam menghadapi pengaruh negatif globalisasi, disintegrasi, maupun konflik sosial.

Kendala yang dihadapi Kesbangpol Hulu Sungai Utara, walaupun memiliki peran yang strategis, Kesbangpol kabupaten Hulu Sungai Utara menghadapi beberapa kendala dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila, antara lain:

- 1) Keterbatasan anggaran daerah, yang menyebabkan program tidak selalu bisa dilaksanakan secara berkesinambungan.
- 2) Partisipasi pelajar masih rendah, banyak yang menganggap kegiatan pembinaan ideologi membosankan dan tidak sesuai dengan kebutuhan generasi milenial.
- 3) Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kemampuan dalam menggunakan metode pembinaan yang kreatif dan inovatif.

- 4) Pengaruh media sosial dan globalisasi, yang sering kali lebih dominan membentuk pola pikir generasi muda dibandingkan program pembinaan formal.

Kesbangpol bertindak sebagai pelaksana kebijakan di daerah dengan berfokus pada kegiatan sosialisasi, pembekalan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. Peran ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat melalui BPIP, sehingga terjadi sinergi antara pusat dan daerah dalam membina kesadaran ideologis masyarakat. Dengan demikian, evaluasi terhadap efektivitas program Kesbangpol menjadi penting untuk mengukur sejauh mana kontribusinya dalam memperkuat ketahanan nasional.



C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

